

**KONSTITUSIONALITAS PENGANGKATAN KEPALA
OTORITA IBU KOTA NUSANTARA PERSPEKTIF
SIYASAHTANFIDZIAH**



**SYAHRUL MUBIN
1911150095**

**KONSTITUSIONALITAS PENGANGKATAN KEPALA
OTORITA IBU KOTA NUSANTARA PERSPEKTIF**

SIYASAH TANFIDZIAH



SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Serjana Hukum (S.H)

Disusun Oleh :

SYAHRUL MUBIN

1911150095

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO
BENGKULU
TAHUN 2023**

SURAT PERNYATAN

Dengan ini saya menyatakan:

1. Skripsi dengan judul: **"Konstitusionalitas Pengangkatan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Perspektif *Siyasah Tanfidziah*"** adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di UIN Fatmawati Sukrano maupun di perguruan tinggi lain.
2. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran serta ide saya sendiri, tanpa bantuan tidak sah dari orang lain kecuali dari tim pembimbing.
3. Didalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya orang atau pendapat yang telah ditulis dan dipublikasikan orang lain, kecuali dikutip secara tulis dan jelas dicantumkan sebagai acuan di dalam nsakah saya dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan pada Daftar Pustaka.
4. Bersedia skripsi ini diterbitkan di Jurnal Ilmiah Fakultas Syariah atas nama saya dan dosen pembimbing skripsi saya.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu.....Oktober 2023


704A9AKX671850985
Syahrul Mubin
NIM:1911150095



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO
BENGKULU

Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Syahrul Mubin, NIM 1911150095 dengan judul
"Konstitusionalitas Pengangkatan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara
Perspektif Siyasah Tanfidziah" Program Studi Hukum Tata Negara Jurusan
Syariah telah diperiksa dan diperbaiki sesuai dengan saran pembimbing I dan
pembimbing II.

Oleh karena itu, skripsi ini disetujui untuk diujikan dalam sidang
Munaqasyah skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati
Sukarno Bengkulu.

Bengkulu, 10 Oktober 2023

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Nenar Julir, M.Ag
NIP. 197509252006042002

Ade Kosasih, S.H., M.H
NIP. 1982203182010011012



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO
BENGKULU**

**Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172**

LEMBAR PENGESAHAN

**Skripsi disusun oleh Syahrul Mubln, NIM 1911150095 yang berjudul
"Konstitusionalitas Pengangkatan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara
Perspektif Siyasa Tanfidziah" Program Studi Hukum Tata Negara, telah diuji
dan dipertahankan didepan Tim Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu pada :**

Hari : Selasa

Tanggal : 17 Oktober 2023

**Dan dinyatakan LULUS, dapat diterima dan disahkan sebagai syarat guna
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Ilmu Hukum Tata Negara.**

Bengkulu, Oktober 2023

Dekan Fakultas Syariah



Dr. Suwarjin, M.A.

NIP. 196904021999031004

Tim Sidang Munaqasyah

Ketua

Dr. Nenon Julir, M.Ag

NIP. 197509252006042002

Penguji I

Dr. Rohmadi, M.A

NIP. 19710320996031001

Sekretaris

Ade Kosasih, S.H.,M.H

NIP. 1982203182010011012

Penguji II

Drs. Tasri, M.A

NIP. 196208211991031002

PERSEMBAHAN

Skripsi dan Gelar keserjanaan ini kupersembahkan untuk:

1. Skripsi ini saya persembahkan sepenuhnya kepada Kedua orang tuaku, Ayah Syamsudin (Alm) dan Ibu Ainam. Terimakasih atas do'a, semangat, motivasi, pengorbanan, nasehat, serta kasih sayang yang tidak pernah henti sampai saat ini. Aku selamanya bersyukur memiliki kedua orang tua yang begitu hebat. Tanpa doamu aku bukanlah apa-apa.
2. Semua Keluarga Besarku. yang selalu mendoakan kebahagiaan dan kesuksesan kepadaku.
3. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah atas ilmu yang diberikan selama ini, terutama kepada pembimbing I: Nenan Julir, M.Ag. dan pembimbing II: Ade Kosasih, S.H.,M.H. selaku pembimbing saya. Terima kasih karena telah memberikan bimbingan, semangat, dan doa, serta kesabarannya. sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
4. Keluarga besar Ma'had Al-Jami'ah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu, Ustadz dan Ustadzah yang telah membimbing dan membina dengan penuh kesabaran dan ketekhlasan dalam mendidik kami dalam menghafal Al-Qur'an serta dalam belajar ilmu-ilmu agama di Ma'had Al-Jami'ah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu.
5. Rekan-Rekan KAPAO (Padli, Masruri, Anton, Ilham, Huda dan Pajri) sebagai teman seperjuangan yang selalu mendukung dalam segala hal selama proses pencapaian keilmuan dan gelar.
6. Teman-teman kelas B HTN 2019 sebagai teman seperjuangan yang selalu ada dalam keadaan suka maupun duka.
7. Semua orang yang mendoakan dan memberikan masukan baik padaku.
8. Almamater Kebanggaanku UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kepada Allah SWT atas segala nikmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul *“Konstitusionalitas Pengangkatan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Perspektif Siyasa Tanfidziah”* Shalawat dan salam untuk Nabi besar Muhammad SAW, yang telah berjuang untuk menyampaikan ajaran Islam sehingga umat Islam mendapatkan petunjuk ke jalan yang lurus baik di dunia maupun akhirat.

Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat guna untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Program Studi Hukum Tata Negara (HTN) Jurusan Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu. Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis mendapat bantuan dan berbagai pihak. Dengan demikian penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Zulkarnain Dali, M.Pd selaku Rektor UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu,
2. Dr. Suwarjin, M.A Selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu.
3. Ifansyah Putra, M. Sos selaku Ketua Prodi Hukum Tata Negara (HTN) Fakultas Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu.
4. Nenang Julir, M.Ag. selaku pembimbing I, yang telah memberikan bimbingan, motivasi, semangat, dan arahan dengan penuh kesabaran.
5. Ade Kosasih, S.H.,MH. Selaku pembimbing II, yang juga telah memberikan bimbingan, motivasi, semangat, dan arahan dengan penuh kesabaran.
6. Kedua orang tuaku dan keluarga besar yang selalu mendoakan kesuksesan penulis.
7. Bapak dan Ibu Dosen fakultas syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu yang telah mengajar dan memberikan berbagai ilmunya dengan penuh keikhlasan.
8. Staf dan karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu.
9. Semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini.

Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari akan banyak kelemahan dan kekurangan dari berbagai sisi. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan skripsi ini ke depan.

Bengkulu, Oktober 2023

Penulis

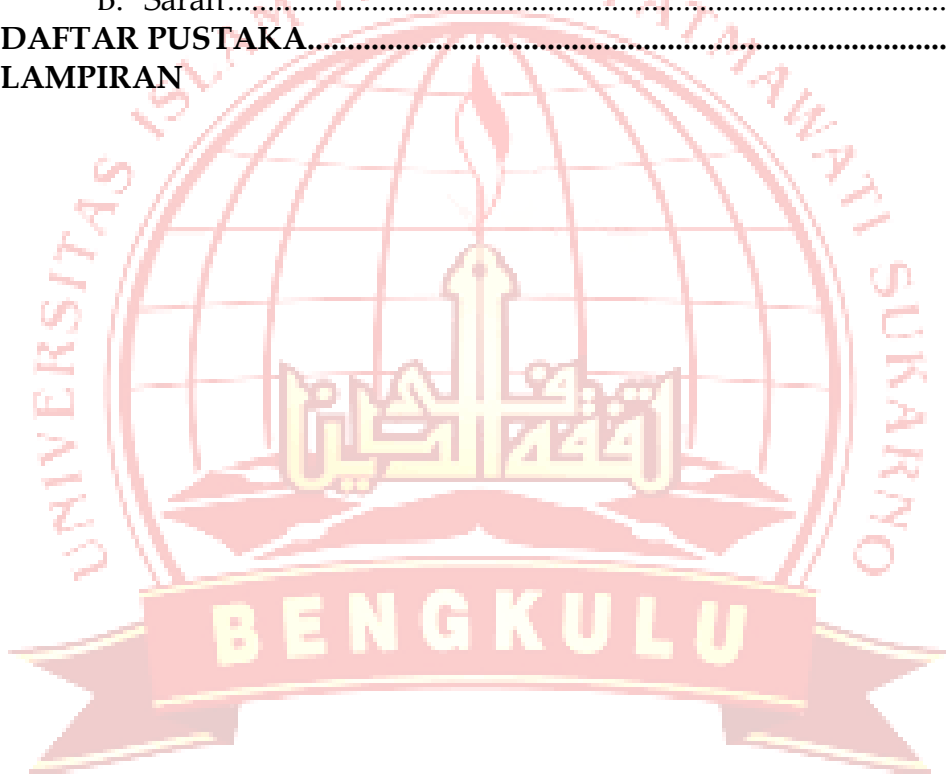
Syahrul Mubin

NIM. 1911150095



HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
MOTTO	v
LEMBAR PERSEMBAHAN	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Kegunaan Penelitian	8
E. Penelitian Terdahulu.....	9
F. Metode Penelitian.....	11
BAB II KAJIAN TEORI	
A. Kepala Otorita.....	14
1. Pengertian Kepala Otorita.....	14
2. Prosedur Pengangkatan Kepala Otorita	15
3. Wilayah Hukum Kepala Otorita	16
B. Otonomi.....	18
1. Otonomi Menurut UUD 1945.....	18
2. Prinsip-Prinsip Otonomi Daerah	22
3. Pembagian Kewenangan Pemerintah Pusat- Pemerintah Daerah Dalam Otonomi Seluas-Luasnya Menurut UUD 1945.....	24
4. Asas Otonomi Daerah.....	31
C. Ibu Kota Nusantara (IKN).....	36
1. Sejarah	36
2. Pelaksanaan Pembangunan IKN Oleh Investor Asing	38
D. Siyasah Tanfidziah	43
1. Pengertian Siyasah Tanfidziah.....	43
2. Kaidah Masalah Mursalah.....	46
3. Dasar-Dasar Kepemimpinan Zaman Rasul.....	49

4. Model Menentukan Pemimpin Dalam Islam.....	51
5. Prinsip-Prinsip Memilih Pemimpin Dalam Islam.....	53
BAB III PEMBAHASAN	
A. Konstitusionalitas Pengangkatan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Dalam Sistem Otonomi Daerah	58
B. Tinjauan Siyash Tanfidziah Tentang Pengangkatan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara.....	65
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	72
B. Saran.....	73
DAFTAR PUSTAKA.....	74
LAMPIRAN	



ABSTRAK

Konstitusionalitas Pengangkatan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Perspektif Siyasah Tanfidziah, Oleh : Syahrul Mubin (1911150095)

Ada dua persoalan yang dikaji dalam skripsi ini, yaitu: (1) Bagaimana Konstitusionalitas Pengangkatan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Dalam Sistem Otonomi Daerah ? (2) Bagaimana Tinjauan Siyasah Tanfidziah Tentang Pengangkatan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara ? Penelitian ini dilakukan dengan tujuan (1) Mengetahui Konstitusionalitas Pengangkatan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Dalam Sistem Otonomi Daerah. (2) Mengetahui Tinjauan Siyasah Tanfidziah Tentang Pengangkatan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara. penelitian menggunakan metode pendekatan perundang-undangan serta konseptual. pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah undang-undang serta regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang sedang dihadapi. maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: (1) Pengangkatan Kepala Otorita IKN bertentangan dengan konstitusi (Inkonstitusional), dalam hal ini Pada Pasal 5 Ayat (4) UU Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Nusantara, mengenai Pengangkatan kepala otorita Ibu Kota Nusantara dalam hal ini bertentangan dengan UUD NRI 1945, UU pemilihan kepala Daerah, dan UU kementerian. bahwa menyatakan kepala pemerintah daerah dipilih secara demokratis. (2) Dalam islam, setiap kebijakan kekuasaan tidak boleh menyimpang dari nilai-nilai ajaran islam, dan politik kekuasaan harus mempertimbangkan kemaslahatan umatnya. Akan tetapi kebijakan-kebijakan di dalam UU IKN tidak tidak memperhatikan kemaslahatan umat, kemudian mencuri hak rakyat dalam hal ini: pertama terjadinya pemborosan anggaran, sebenarnya aturan itu sudah ada. Tapi, untuk memuluskan keinginan yang dimau pemerintah maka dibuat aturan baru. Kedua menciderai hak rakyat, dalam hal ini presiden menggunakan hak prerogatifnya, Padahal sudah ada aturan bahwa itu adalah dipilih oleh rakyat.

Kata Kunci: kepala otorita, otonomi daerah, siyasah tanfidziah

ABSTRACT

Constitutionality of the Appointment of the Head of the Archipelago Capital Authority from Siyasa Tanfidziah's Perspective, By: Syahrul Mubin 1911150095.

There are two issues studied in this thesis, namely: (1) What is the Constitutionality of the Appointment of the Head of the National Capital Authority in the Regional Autonomy System? (2) What is the Siyasa Tanfidziah Review regarding the Appointment of the Head of the Archipelago Capital Authority? This research was conducted with the aim of (1) Knowing the Constitutionality of the Appointment of the Head of the Archipelago Capital Authority in the Regional Autonomy System. (2) Knowing the Review of the Tanfidziah Siyasa Regarding the Appointment of the Head of the Archipelago Capital Authority. The research uses statutory and conceptual approaches. The approach is taken by examining the laws and regulations related to the legal issue being faced. then the following conclusions can be drawn: (1) The appointment of the Head of the IKN Authority is contrary to the constitution (Unconstitutional), in this case in Article 5 Paragraph (4) of Law Number 3 of 2022 concerning the Archipelago Capital, regarding the Appointment of the head of the Archipelago Capital Authority in the case This is contrary to the 1945 NRI Constitution, the Regional Head Election Law, and the Ministry Law. that states that the head of regional government is elected democratically. (2) In Islam, every power policy must not deviate from the values of Islamic teachings, and power politics must take into account the benefit of its people. However, the policies in the IKN Law do not pay attention to the benefit of the people, and then steal people's rights in this case: firstly there is budget waste, in fact the regulations already exist. However, to fulfill the government's wishes, new regulations were made. Second, it injures the people's rights, in this case the president uses his prerogative, even though there is a rule that he is elected by the people.

Keywords: *head of authority, regional autonomy, siyasa tanfidziah*